

# PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI ISLAM NEGERI MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Oleh:

**Safriadi**

## ABSTRAK

*Tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan tinggi Islam sekarang semakin global, terbuka dan kompetitif. Lembaga pendidikan tinggi Islam dituntut memiliki kualitas yang siap bersaing di dunia global. Masyarakat modern saat ini, lebih obyektif dan rasional tidak akan mempan lagi ditawarkan simbol atau sebatas label tanpa makna yang sesuai dengan tuntutan hidup mereka. Akibatnya, jika perguruan tinggi Islam negeri tidak memberikan sesuatu yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat bisa jadi akan banyak yang meninggalkannya. Sehingga atas dasar pemikiran itu, banyak orang yang mendiskusikan di berbagai forum, bagaimana menjadikan perguruan tinggi Islam negeri semakin maju dan memiliki daya tarik serta siap berkompetisi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Perhatian pemerintah sangat diperlukan dalam pengembangan PTIN menghadapi MEA. Kementerian Agama RI mencanangkan untuk menjadikan Indonesia sebagai “kiblat pendidikan Islam dunia”. Islam Indonesia akan menjadi trade-mark bagi bangsa Indonesia dan menjadi daya tarik bagi bangsa-bangsa lain untuk belajar Islam. Kementerian Agama juga memberikan program beasiswa 5000 Doktor yang akan menjadi garda terdepan pengembangan kajian dan pembelajaran Islam di PTIN. Ini merupakan kebijakan pemerintah dalam menyiapkan PTIN siap berkompetisi menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Berdasarkan potensi-potensi yang disebutkan diatas, ada beberapa langkah strategis dapat dipertimbangkan dalam pengembangan PTIN menghadapi MEA, yaitu perubahan mindset PTIN dari paradigma menonton menjadi aktor, mampu melahirkan lulusan memiliki jiwa entrepreneurship, diplomasi jalur akademik bertaraf internasional, pengiriman dosen PTIN ke luar negeri, kebijakan berbasis internasional, peningkatan kompetensi bahasa asing, pengelolaan administratif berstandar internasional, standarisasi sarana akademik dan memperbanyak kegiatan penelitian serta penambahan dana riset.*

**Kata Kunci:** Pengembangan PTIN, MEA

## PENDAHULUAN

Pada tahun 2014 lalu Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) kerjasama dengan Universitas Islam Negeri Jakarta dan Universitas Islam Negeri Malang menyelenggarakan Konferensi Internasional dengan tema *Towards World Class Islamic Higher Education Institutions*. Menuju Lembaga Pendidikan Tinggi Islam Kelas Dunia). Tema *world class* menjadi perbincangan yang hangat di kalangan perguruan

tinggi. Beberapa tahun terakhir, kampus-kampus negeri maupun swasta telah berupaya menjadi universitas kelas dunia atau *world class university* (WCU).<sup>1</sup>

Sebagian perguruan tinggi banyak yang berupaya agar menjadi perguruan tinggi berkelas dunia sehingga dapat bersaing dengan kampus-kampus level dunia dan sekaligus menghasilkan lulusan yang juga dapat bersaing dengan lulusan dari negara-negara maju di dunia internasional. Paradigma tersebut muncul karena melihat beberapa kenyataan saat ini dan akibat dari globalisasi dalam berbagai sendi kehidupan manusia. Globalisasi tidak semata-mata mempengaruhi sistem pasar, tetapi juga dalam sistem pendidikan. Respons yang diberikan terhadap isu ini oleh kalangan pendidikan hanya dengan tiga sikap; Permisif, berarti menerimanya sebagai sesuatu yang *take for granted*. Defensif, berarti menunjukkan sikap apriori karena budaya global tersebut tidak datang dari tradisi yang diikutinya selama ini. Transformatif, sikap cenderung berupaya untuk mendialogkannya dengan budaya local sehingga terjadi sintesis budaya yang dinamis dan harmonis.<sup>2</sup>

*Pertama*, globalisasi dalam bidang ekonomi yang di wujudkan dalam praktik ekonomi pasar bebas. *Kedua*, globalisasi dalam bidang budaya dalam bentuk masuknya budaya asing ke Indonesia. *Ketiga*, globalisasi tenaga kerja sebagai akibat dari praktik ekonomi pasar bebas. *Keempat*, globalisasi bidang pendidikan dengan pendirian lembaga pendidikan di banyak negara berkembang dan beasiswa antar-negara. Dalam globalisasi itulah setiap orang seakan dituntut menguasai pengetahuan dan kemampuan yang dapat digunakan sebagai modal utama memasuki ekonomi pasar bebas, tujuannya agar dapat berkompetisi dan memenangkan kompetisi global itu.<sup>3</sup>

Negara-negara yang berada di kawasan ASEAN sudah seharusnya menempatkan sektor pendidikan pada skala prioritas, didasari oleh suatu keyakinan mendalam, bahwa perkembangan-perkembangan sektor-sektor lain banyak ditentukan oleh variabel pendidikan rakyatnya. Para pengambil kebijakan negara perlu memprioritaskan sektor pendidikan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang menuntut keahlian dan profesional sehingga siap berkompetesi di dunia

---

<sup>1</sup> Naskah Pidato Menteri Agama dalam Welcoming Speech “*International Conference on Quality Islamic Higher Education*” di Jakarta, 25 Nopember 2014.

<sup>2</sup> Mansur, Amril dkk. *Paradigma Baru Reformasi Pendidikan Tinggi Islam*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2004), 49.

<sup>3</sup> Naskah Pidato Menteri Agama...

global. Penyusunan program-program pendidikan yang berkaitan langsung dengan dunia pekerjaan dan dapat bersaing di dunia global dipandang sangat mendesak.

Di era globalisasi sekarang, para lulusan perguruan tinggi dituntut untuk menguasai pengetahuan dan kemampuan yang dapat digunakan sebagai modal utama dalam menjalani hidup di dunia modern, tujuannya tentu agar dapat berkompetesi dan sukses didalamnya. Globalisasi juga membuat negara-negara ASEAN merasa harus menyetarakan kualitas dirinya sejajar dengan negara-negara maju dilihat dari Human Development Index (HDI), Program for International Student Assessment (PISA) dan lainnya. Dari sinilah nilai-nilai kompetensi di ransang dan dikembangkan, terlebih ketika dipupuk oleh rasa inferioritas diri negara-negara ASEAN dalam bentuk pengejaran angka-angka HDI, PISA dan sejenisnya.

Apabila dilihat sistem pendidikan nasional yang telah dibangun selama tiga dasa-warsa, ternyata belum mampu sepenuhnya menjawab kebutuhan dan tantangan nasional dan kemajuan global dewasa ini. Program nasional pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan yang selama ini merupakan fokus pembinaan masih menjadi masalah yang paling menonjol dalam dunia pendidikan di negara kita.

Menurut Azyumardi Azra hampir seluruh negara muslim tidak mempunyai kebijakan (policy) dan perencanaan nasional yang jelas, menyeluruh, terpadu dan terarah untuk pengembangan sains dan teknologi. Bahkan, dalam banyak kasus merupakan bidang yang paling terlantar dari kebijaksanaan nasional yang terlalu bertitik tekan pada pertumbuhan ekonomi.<sup>4</sup> Hal ini kontras dengan negara-negara maju yang memberikan perhatian khusus pada kebijaksanaan pendidikan dalam arti luas, bahkan melebihi kebijaksanaan luar negeri atau militer. Sebab, kegagalan pada pengembangan pendidikan nasional secara luas dapat menghambat perkembangan secara menyeluruh dimasa depan.<sup>5</sup>

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang informasi, komunikasi dan transportasi yang amat cepat, eskalasi pasar bebas antar negara dan bangsa yang semakin meningkat, iklim kompetisi dalam berbagai bidang kehidupan yang semakin ketat, dan tuntutan demokratisasi merupakan tantangan yang harus

---

<sup>4</sup> Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 17.

<sup>5</sup> Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi ...*, 17.

dipersiapkan oleh bangsa Indonesia agar bisa hidup terus dan bertahan dalam percaturan kehidupan antar bangsa di dunia.

Berdasarkan fenomena itu, tantangan yang dihadapi perguruan pendidikan tinggi Islam negeri sekarang semakin global, terbuka dan kompetitif. Perguruan tinggi Islam negeri dituntut memiliki kualitas dan standarisasi internasional. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat modern saat ini, yang memiliki pandangan lebih obyektif dan rasional tidak akan mempan lagi ditawarkan simbol atau sebatas label tanpa makna yang sesuai dengan tuntutan hidup mereka. Akibatnya, jika perguruan tinggi Islam negeri tidak memberikan sesuatu yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat bisa jadi akan banyak yang meninggalkannya. Sehingga atas dasar pemikiran itu, banyak orang yang mendiskusikan di berbagai forum, bagaimana menjadikan perguruan tinggi Islam semakin maju dan memiliki daya tarik serta siap berkompetesi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Secara kuantitas, jumlah Perguruan tinggi Islam negeri sekarang semakin bertambah, ditambah perguruan tinggi Islam swasta yang lebih banyak dari itu, ternyata belum terlihat maju, masih kalah dalam persaingannya dengan perguruan tinggi umum. Sudah banyak lembaga pendidikan tinggi di Indonesia yang menggunakan label Islam atau beridentitas Islam, tetapi belum banyak yang menempati posisi papan atas. Bahkan sebaliknya, kebanyakan masih menunjukkan ketertinggalan dengan lembaga pendidikan tinggi umum, bahkan tidak sedikit lembaga pendidikan tinggi Islam yang berjalan apa adanya. Fasilitas dan tenaga dosen maupun daya dukung lainnya yang tersedia terbatas, baik jumlah maupun kualitasnya. Label Islam yang dilekatkan pada lembaga pendidikan tinggi yang dikembangkan belum menggambarkan kemajuan yang menggembirakan.

Berdasarkan permasalahan yang telah di uraiakan diatas, maka perlu melakukan perencanaan yang matang terhadap arah pengembangan perguruan tinggi Islam negeri dalam menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) *Pertama*, bagaimana sejarah perkembangan Perguruan Tinggi Islam Negeri (PTIN) di Indonesia? *Kedua*, Sejauhmana kesiapan PTIN dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean? *Ketiga*, langkah-langkah pengembangan apa saja yang harus dilakukan perguruan tinggi Islam negeri menuju era Masyarakat Ekonomi Asean? Beberapa persoalan yang telah disebutkan diatas akan dibahas dalam kajian berikut.

## PEMBAHASAN

### A. Sejarah Perkembangan Perguruan Tinggi Islam Negeri

Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia sudah direncanakan sebelum Indonesia merdeka. Pada tanggal 2-7 Mei 1939 di Solo diadakan Konggres II MIAI (Majlis Islam A'la Indonesia) yang dihadiri oleh 25 organisasi Islam yang menjadi anggota, dengan keputusan mereka mendukung untuk mendirikan pendidikan tinggi Islam. Namun usaha itu belum berhasil karena pecahnya perang dunia kedua. Semangat yang menggelora tentang rencana pendirian pendidikan tinggi Islam itu akhirnya ditindaklanjuti oleh Masyumi (Majlis Syura Muslimin Indonesia) sebuah gabungan organisasi-organisasi Islam Indonesia, dengan menyelenggarakan rapat yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Islam seperti Muhammad Natsir, Wahid Hasyim, dan Mas Mansur, serta Mohamad Hatta sebagai tokoh Nasional. Sidang akhirnya membentuk panitia perencana Sekolah Tinggi Islam (STI) yang diketuai Mohamad Hatta dengan sekretaris Mohamad Natsir.<sup>6</sup>

Kemudian atas bantuan pemerintah Jepang, bertepatan pada tanggal 8 Juli 1945 di Jakarta dibuka secara resmi sebuah Sekolah Tinggi Islam (STI) dibawah pimpinan Abdul Kahar Muzakkir. Tujuannya adalah untuk menghasilkan alim ulama yang intelek, yaitu mereka yang mempelajari ilmu pengetahuan agama Islam secara luas dan mendalam, serta mempunyai pengetahuan umum yang perlu dalam masyarakat modern. Kurikulum yang dipakai mengikuti kurikulum Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Tetapi setelah itu, karena adanya agresi Belanda, maka STI tersebut terpaksa ditutup.<sup>7</sup>

Ketika Ibukota negara pindah dari Jakarta ke Jogjakarta pada tanggal 10 April 1946, STI tersebut dibuka kembali dengan dihadiri Presiden Sukarno dan wakil Presiden Mohammad Hatta. Untuk meningkatkan jangkauannya, maka STI tersebut diubah menjadi universitas pada tanggal 22 Maret 1948 dengan nama Universitas Islam Indonesia (UII), dengan empat fakultas, yaitu Fakultas Agama, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Pendidikan. Kemudian dengan keluarnya PP Nomor 34 Tahun 1950, Fakultas Agama UII diserahkan kepada Kementerian Agama RI (dinegerikan) menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) dipimpin oleh

---

<sup>6</sup><http://islamadalabrahma.blogspot.com/2011>. Mustanan, *Lahirnya IAIN Sebagai Perguruan Tinggi Islam*, di akses tanggal 17 Maret 2016.

<sup>7</sup> Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indodesia*, (Jakarta: Mutiara, 1979), 288.

Mohammad Adnan, dengan tiga jurusan, yaitu: Tarbiyah, Qadha' dan Dakwah. Sesudah itu pada tanggal 1 Juni 1957 di Jakarta berdiri Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA).<sup>8</sup>

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1960, PTAIN dan ADIA digabungkan dan diberi nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di Jogjakarta dengan Fakultas Ushuluddin, Syari'ah dan Tarbiyah serta Fakultas Syari'ah di Banda Aceh dan di Jakarta dengan Fakultas Tarbiyah dan Adab.<sup>9</sup> Perkembangan berikutnya pada tahun 1963 Fakultas Tarbiyah dan Adab Jakarta menjadi IAIN sendiri dengan nama IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada tahun 1963 juga berdiri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan Fakultas Syari'ah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin. Setelah itu berturut-turut berdirilah beberapa IAIN di Indonesia yang sampai tahun 1973 sejumlah 14 buah.

Dalam perkembangan berikutnya, telah berdiri cabang-cabang IAIN untuk memberikan pelayanan pendidikan tinggi yang lebih luas terhadap masyarakat, sampai berjumlah 40 fakultas cabang IAIN. Kemudian dalam rangka rasionalisasi organisasi dan penyesuaian dengan sistem pendidikan Nasional, maka berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 40 fakultas cabang IAIN itu dilepas dan menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Selanjutnya dalam memenuhi tuntutan masyarakat dan adanya tantangan global, maka dibukalah satu demi satu fakultas/jurusan/program studi umum di STAIN dan IAIN.<sup>10</sup>

Dengan berkembangnya fakultas, jurusan dan program studi pada IAIN di luar studi keislaman itu, maka status lembaga yang disebut "sekolah tinggi" atau "institut" itu juga harus berubah menjadi "universitas", karena harus menyesuaikan dengan jenis kajian ilmu yang dibinanya. Maka berubahlah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2002. Dua tahun berikutnya, yakni pada tahun 2004 IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta dan STAIN Malang juga berubah menjadi UIN. Beberapa tahun berikutnya IAIN Bandung, IAIN Riau, IAIN Makasar, pada tahun 2013 IAIN Ar-Raniry Banda Aceh dan IAIN Sunan Ampel Surabaya. Kemudian beberapa tahun berikutnya, IAIN Walisongo Semarang dan IAIN Raden Fatah Palembang dan IAIN Sumatra Utara juga ikut berubah menjadi UIN. Sampai sekarang berarti sudah

---

<sup>8</sup> Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam...*, 288.

<sup>9</sup> Buku Panduan Akademik UIN Ar-Raniry Tahun Akademik 2015/2016, 1.

<sup>10</sup> Marwan Salahuddin, *Model Pengembangan Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia*, Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, Volume 18 Nomor 1 (Juni) 2014, 123.

ada 11 Universitas Islam Negeri di Indonesia, sedangkan IAIN ada 25 buah dan STAIN ada 18 buah.<sup>11</sup>

Transformasi IAIN menjadi UIN merupakan titik sejarah yang tidak boleh dilewatkan begitu saja dalam sejarah panjang pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Ditengah berbagai problem pendidikan di Indonesia, mulai dari persoalan subsidi pemerintah hingga soal rendahnya kualitas pendidikan, transformasi ini melahirkan harapan baru dalam konteks pendidikan tinggi Islam di Indonesia.

Pengembangan dan konversi IAIN ke UIN adalah proyek keilmuan. Proyek pengembangan wawasan keilmuan dan perubahan tata pikir keilmuan yang bernafaskan keagamaan transformatif. Bukan berubah asal berubah, bukan sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar proyek fisik. Konversi dari IAIN ke UIN adalah momentum untuk membenahi dan menyembuhkan “luka-luka dikotomi” keilmuan umum dan agama yang makin hari makin menyakitkan.<sup>12</sup>

Proyek besar reintegrasi epistemologi keilmuan umum dan agama mengandung arti perlunya dialog dan kerja sama antara disiplin ilmu umum dan agama yang lebih erat di masa yang akan datang. Pendekatan interdisciplinary dikedepankan, interkoneksi dan sensitifitas antar berbagai disiplin ilmu-ilmu kealaman dengan disiplin ilmu-ilmu agama perlu diupayakan secara terus menerus dan relevan dengan konteks kehidupan modern.<sup>13</sup>

## **B. ASEAN Economic Community (AEC) dan Kesiapan PTIN**

Pembentukan MEA berawal dari kesepakatan para pemimpin ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia. Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan daya saing ASEAN serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Modal asing dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan warga ASEAN. Saat itu, ASEAN meluncurkan inisiatif pembentukan integrasi kawasan ASEAN atau komunitas masyarakat ASEAN melalui ASEAN Vision 2020 saat berlangsungnya *ASEAN Second*

---

<sup>11</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/daftar> Perguruan Tinggi Islam Negeri di Indonesia. Di akses Tanggal 17 Maret 2016.

<sup>12</sup> Amin Abdullah, dkk. *Islamic Studies dalam Paradigma Intergratif-interkoneksi*. (Yogyakarta: Suka Press, 2007), 33.

<sup>13</sup> Amin Abdullah, dkk. *Islamic Studies...*, 33.

*Informal Summit*. Inisiatif ini kemudian diwujudkan dalam bentuk *roadmap* jangka panjang yang bernama *Hanoi Plan of Action* yang disepakati pada 1998.<sup>14</sup>

Indonesia termasuk salah satu negara dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community* (AEC) yang akan bergulir mulai akhir tahun 2015. MEA merupakan realisasi pasar bebas di Asia Tenggara yang sebelumnya telah disebut dalam *Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation* pada tahun 1992. Pada pertemuan tingkat Kepala negara ASEAN (*ASEAN Summit*) ke-5 di Singapura pada tahun 1992 tersebut para Kepala Negara mengumumkan pembentukan suatu kawasan perdagangan bebas di ASEAN (AFTA) dalam jangka waktu 15 tahun. Kemudian dalam perkembangannya dipercepat menjadi tahun 2003, dan terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002.<sup>15</sup>

MEA yang sudah di depan mata, pemerintah Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan langkah strategis dalam sektor pendidikan, sektor tenaga kerja, sektor infrastruktur, dan sektor industri. Dalam era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), pemerintah Indonesia menyiapkan respon kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan tinggi, pengembangan industri nasional, pengembangan infrastruktur, pengembangan logistik, pengembangan investasi, dan pengembangan perdagangan. Selain hal tersebut masing-masing kementerian dan lembaga berusaha menghadapi MEA dengan langkah-langkah strategis.

Kementerian Ristek dan Dikti harus membuat kebijakan strategis bagi perguruan tinggi agar siap berkompetisi menghadapi persaingan MEA, tidak hanya sebatas himbauan tapi perlu *political will* dari pemerintah. Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah sangat mendorong dan termotivasi lembaga pendidikan tinggi untuk terus meningkatkan kualitas dan mutu lulusan sehingga dapat berkompetisi di dunia global.

Perguruan tinggi harus diberikan wewenang untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas dan mutu perguruan tinggi. Dengan cara peningkatan dana untuk riset dan penelitian, pengembangan mutu dosen, dan peningkatan kualitas lulusan. Kementerian Keuangan melalui Lembaga Pengelolaan

---

<sup>14</sup><http://www.bppk.kemenkeu.go.id/12/Februari/2015>. G.T. Suroso, *Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan Perekonomian Indonesia*. di akses tanggal 17 Maret 2016.

<sup>15</sup><http://www.bppk.kemenkeu.go.id/12/Februari/2015>. G.T. Suroso, *Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan Perekonomian Indonesia*. di akses tanggal 17 Maret 2016.



Dana Pendidikan (LPDP) telah membuat program beasiswa bagi anak berprestasi. Menristek Dikti juga meluncurkan berbagai program beasiswa, ini merupakan good will pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Langkah tersebut di sambut baik oleh pihak perguruan tinggi. Dengan adanya beasiswa tersebut diharapkan dapat dipergunakan untuk pengembangan mutu dosen dan peningkatan kualitas tenaga kependidikan di perguruan tinggi.

Dalam konteks perguruan tinggi Islam negeri, selama ini banyak PTIN mengejar kuantitas lulusan bahkan mengabaikan kualitas. Sudah saatnya merubah paradigma berfikir di lingkungan PTIN untuk melahirkan lulusan yang memiliki entrepreneurial (wirausaha) dan profesional sehingga siap bersaing di dunia global. Maka dengan adanya momentum MEA, sudah saatnya PTIN mengubah pola pikir lama itu, yang cenderung dogmatis dan birokratis dengan pola pikir *entrepreneurship* yang lebih taktis, efektif dan efisien. Perubahan paradigma tersebut diharapkan supaya lulusan PTIN tidak menjadi penonton akan tetapi menjadi aktor dalam mewarnai perubahan dikawasan Asean.

Dalam bidang kurikulum, PTIN dapat mengembangkan kurikulum pendidikan yang menyiapkan lulusan siap berkompetisi di dunia global. Kurikulum yang dikembangkan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta prioritas terhadap peningkatan skill dan keahlian lulusan yang memiliki daya saing tinggi. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum PTIN dalam rangka mempersiapkan peserta didik (mahasiswa) yang mampu berkompetisi di dunia internasional.

Sebagian PTIN di Indonesia sudah memperoleh rekognisi atau dikenal secara luas oleh masyarakat internasional, maka langkah selanjutnya yang harus ditempuh ialah reputasi internasional bisa dilihat dari dua sisi. *Pertama*, lulusan perguruan tinggi Islam negeri, dengan adanya reputasi internasional, maka secara akademik kompetensi lulusan perguruan tinggi Islam Negeri di tanah air dapat diterima oleh masyarakat atau lembaga-lembaga internasional. Sebagai contoh, karena saat ini negara-negara Asean sudah mengikat diri memasuki tata kehidupan baru yang disebut Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di mana arus barang dan jasa menjadi bebas dan terbuka di seluruh negara Asean mulai awal 2016, maka lulusan perguruan tinggi Islam Negeri harus mampu bersaing dan dapat bekerja di lembaga-lembaga di semua negara Asean. Tentu

saja, untuk bisa memperoleh kesempatan itu diperlukan kompetensi yang memadai untuk dapat bersaing dengan alumni perguruan tinggi diseluruh negara Asean.<sup>16</sup>

*Kedua*, menyangkut dosen, dengan reputasi internasional, maka kompetensi dosen perguruan tinggi Islam negeri minimal sejajar dengan kompetensi-kompetensi para dosen di level perguruan tinggi se-Asean. Syukur jika bisa lebih. Dosen perguruan tinggi Islam negeri harus bisa diterima untuk menjadi dosen-dosen tamu atau menjadi pembicara di forum-forum akademik di perguruan-perguruan tinggi di Asean. Begitu juga karya ilmiah mereka bisa digunakan sebagai referensi para mahasiswa dan sivitas akademika di perguruan-perguruan tinggi di Asean. Tentu saja, untuk terakhir ini secara khusus diperlukan kompetensi berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dalam bahasa internasional, termasuk bahasa Inggris. Sebab, kendati bahasa Melayu merupakan bahasa dengan jumlah penutur terbesar di Asean yang meliputi masyarakat Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand Selatan, tetapi bahasa Inggris tetap menjadi bahasa resmi Asean. Rupanya dengan jumlah penutur yang sangat besar, bahasa Melayu belum cukup memiliki kekuatan untuk menjadi bahasa Asean, dengan berbagai sebab dan alasan.<sup>17</sup>

Pada saat ini, perkembangan perguruan tinggi Islam negeri sangat pesat. Kementerian Agama mencanangkan untuk menjadikan Indonesia sebagai “kiblat pendidikan Islam dunia”. Jika selama ini ada kesan kiblat dan pusat pendidikan Islam berada di negara-negara Timur Tengah yang menggunakan bahasa Arab, maka sudah saatnya Indonesia menjadi kiblat pendidikan Islam bagi warga internasional. Selain Indonesia memiliki banyak pemikir Islam, juga bentuk pendidikan Islam di Indonesia yang beragam dan khas (distingtif). Memiliki kesiapan yang cukup untuk menjadi tuan rumah bagi warga negara lain belajar Islam di Indonesia.

*Pertama*, Indonesia merupakan negara demokratis terbesar di dunia dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Pada saat negara-negara Islam Timur Tengah, terutama kawasan Arab, dilanda persoalan politik yang berujung pada suasana konflik, bangsa Indonesia dengan jumlah penduduk Muslim mayoritas menjadi magnet baru bagi bangsa-bangsa lain sebagai contoh pelaksanaan demokrasi, hubungan antar agama

---

<sup>16</sup><http://pasca.uin-malang.ac.id/> 8 Maret 2016/ Mudjia Rahadjo/*pengembangan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. di akses 21 Maret 2016.

<sup>17</sup><http://pasca.uin-malang.ac.id/> 8 Maret 2016/ Mudjia Rahadjo/*pengembangan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. di akses 21 Maret 2016.

yang harmonis, pluralisme, kemajuan ekonomi, dan kompatibilitas Islam dan hak-hak asasi manusia.

*Kedua*, Indonesia dipercaya oleh negara-negara Islam untuk menyelenggarakan even-even internasional tentang Islam. Ketiga, performan jamaah haji Indonesia di mata dunia juga sangat positif. Pelaksanaan haji Indonesia mempunyai tingkat kepercayaan internasional yang sangat tinggi. Selain jumlah jamaah haji Indonesia yang sangat besar, haji dapat dijadikan ajang promosi yang luar biasa tentang Islam Indonesia.

*Keempat*, beberapa perguruan tinggi Islam telah memiliki mahasiswa asing dengan jumlah yang besar. Ada ratusan mahasiswa berasal dari Australia, Amerika, Mesir, Yaman, Maroko, Vatikan, Rusia, Malaysia, Singapura, Thailand, Philipina, dan seterusnya. Sejumlah perguruan tinggi Islam negeri telah membuka kelas internasional, jumlah ini akan semakin meningkat seiring dengan minat dan kepercayaan internasional yang semakin tinggi terhadap Indonesia yang aman, damai, dan merupakan negara muslim paling demokratis di dunia.

Optimisme pemerintah pada masa depan, Islam Indonesia akan menjadi trademark bagi bangsa Indonesia dan menjadi daya tarik bagi bangsa-bangsa lain belajar Islam. Untuk mendukung program tersebut mulai tahun 2015, Kementerian Agama RI akan memberikan biaya studi 1.000 Calon Doktor setiap tahunnya untuk kuliah di berbagai universitas, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Selama lima tahun yang akan datang, diharapkan akan lahir 5.000 Doktor yang akan menjadi garda terdepan pengembangan kajian dan pembelajaran Islam di Indonesia. Inilah kebijakan pemerintah dalam menyiapkan PTIN menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

### **C. Langkah-langkah Strategis Pengembangan PTIN Menghadapi MEA**

Indonesia memiliki peluang yang sangat terbuka untuk turut berperan di pentas internasional, peluang emas ini harus disikapi dengan bijak oleh perguruan tinggi Islam negeri. Indonesia memiliki aset sosial dan politik yang sangat besar, sehingga memiliki nilai lebih dari para tetangganya. Di Asean, hanya Indonesia yang diterima menjadi anggota G 20. Dengan potensi sosial dan ekonomi yang begitu besar, negara Indonesia jangan lagi mempertahankan mindset menerima bantuan dan menjadi penonton, tetapi sudah harus mengambil inisiatif dan menjadi aktor perubahan dunia khususnya di negara-negara Asean .

Sejauh ini, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan rencana strategis untuk menghadapi MEA atau AEC (ASEAN Economic Community), antara lain sebagai berikut:<sup>18</sup>

a. Penguatan Daya Saing Ekonomi

Pada 27 Mei 2011, Pemerintah meluncurkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). MP3EI merupakan perwujudan transformasi ekonomi nasional dengan orientasi yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. Sejak MP3EI diluncurkan sampai akhir Desember 2011 telah dilaksanakan *Groundbreaking* sebanyak 94 proyek investasi sektor riil dan pembangunan infrastruktur.

b. Program ACI (Aku Cinta Indonesia)

ACI (Aku Cinta Indonesia) merupakan salah satu gerakan '*Nation Branding*' bagian dari pengembangan ekonomi kreatif yang termasuk dalam Inpres No.6 Tahun 2009 yang berisikan Program Ekonomi Kreatif bagi 27 Kementerian Negara dan Pemda. Gerakan ini sendiri masih berjalan sampai sekarang dalam bentuk kampanye nasional yang terus berjalan dalam berbagai produk dalam negeri seperti busana, aksesoris, entertainment, pariwisata dan lain sebagainya. (dalam Kemendag RI : 2009:17).

c. Penguatan Sektor UMKM

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan UMKM di Indonesia, pihak Kadin mengadakan mengadakan beberapa program, antara lainnya adalah "Pameran Koperasi dan UKM Festival" pada 5 Juni 2013 lalu yang diikuti oleh 463 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM). Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk UKM yang ada di Indonesia dan juga sebagai stimulan bagi masyarakat untuk lebih kreatif lagi dalam mengembangkan usaha kecil serta menengah.

Selain itu, persiapan Indonesia dari sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) untuk menghadapi MEA 2015 adalah pembentukan Komite Nasional Persiapan MEA 2015, yang berfungsi merumuskan langkah antisipasi serta

---

<sup>18</sup> <http://www.id.stie-stmy.ac.id/berita-165-28-Oktober-2014-persiapan> Indonesia dalam menghadapi MEA. di akses tanggal 21 Maret 2016.

melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan KUKM mengenai pemberlakuan MEA pada akhir 2015.

Adapun langkah-langkah antisipasi yang telah disusun Kementerian Koperasi dan UKM untuk membantu pelaku KUKM menyongsong era pasar bebas ASEAN itu, antara lain peningkatan wawasan pelaku KUKM terhadap MEA, peningkatan efisiensi produksi dan manajemen usaha, peningkatan daya serap pasar produk KUKM lokal, penciptaan iklim usaha yang kondusif.

c. Perbaikan Infrastruktur

Dalam rangka mendukung peningkatan daya saing sektor riil, selama tahun 2010 telah berhasil dicapai peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur seperti prasarana jalan, perkeretaapian, transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara, komunikasi dan informatika, serta ketenagalistrikan :

1. Perbaikan Akses Jalan dan Transportasi
2. Perbaikan dan Pengembangan Jalur TIK
3. Perbaikan dan Pengembangan Bidang Energi Listrik.

d. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu jalan untuk meningkatkan kualitas SDM adalah melalui jalur pendidikan. Selain itu, dalam rangka memberikan layanan pendidikan yang bermutu, pemerintah telah membangun sarana dan prasarana pendidikan secara memadai, termasuk pengembangan pendidikan tinggi dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

e. Reformasi Kelembagaan dan Pemerintahan

Dalam rangka mendorong Percepatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, telah ditetapkan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang 2012-2025 dan menengah 2012-2014 sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk pelaksanaan aksi setiap tahunnya. Upaya penindakan terhadap Tindak Pidana Korupsi (TPK) ditingkatkan melalui koordinasi dan supervisi yang dilakukan oleh KPK kepada Kejaksaan dan Kepolisian.

Globalisasi tidak hanya menyangkut dan berdampak pada bidang ekonomi, tetapi hampir seluruh elemen kehidupan manusia, maka globalisasi pun berdampak pada

pendidikan tinggi dan perguruan tinggi cepat atau lambat.<sup>19</sup> Menurut Richard C. Atkinson, Presiden University of California, globalisasi bagi perguruan tinggi pun merupakan kekuatan yang mengubah perguruan tinggi dari suatu institusi yang memonopoli ilmu pengetahuan menjadi suatu lembaga dari antara sekian jenis organisasi yang menyediakan informasi dan dari suatu institusi yang selalu dibatasi oleh waktu dan geografi menjadi suatu lembaga tanpa batasan.<sup>20</sup>

Pengaruh globalisasi sehingga lahir Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Sehingga pengaruhnya sampai pada lembaga pendidikan tinggi. Untuk mengetahui ciri-ciri perguruan tinggi yang sudah siap menghadapi globalisasi, ada beberapa karakteristik perguruan tinggi globalisasi, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Teknologi informasi dan komunikasi, seperti internet dan World Wide Web, menyediakan peralatan baru yang sangat ampuh dalam membentuk jaringan global untuk pengajaran dan riset. Proses pembelajaran semakin canggih yang menunjang tayangan audio dan video yang lebih baik, bereaksi secara cepat terhadap masukan mahasiswa, dan sebagainya.
- b. Dalam lingkungan baru, universitas maupun pemberi jasa lainnya dapat memenuhi kebutuhan dan meneguk pendapatan dari pasar yang ada. Universitas global akan mampu mengajar mahasiswa dimanapun, kapanpun dan dapat mengambil dosen dari manapun.
- c. Universitas sudah tidak memonopoli produksi ilmu pengetahuan. Mereka harus bersaing dengan penyedia jasa informasi dan pengetahuan lainnya yang tidak memerlukan kampus dengan segala fasilitas yang mahal.

Dalam konteks pengembangan Perguruan Tinggi Islam Negeri (PTIN), menurut Azyumardi Azra, dilihat dari perspektif perkembangan nasional dan global, maka konsep paradigma baru bagi perguruan tinggi Islam di Indonesia sudah merupakan keharusan.<sup>22</sup> Hal ini akan mendukung eksistensi pengembangan Perguruan Tinggi Islam Negeri (PTIN) dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

---

<sup>19</sup> R. Eko Indrajit. R. Djokopranoto. *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*, (Yogyakarta: CV. Offset, 2006), 93-94.

<sup>20</sup> R. Eko Indrajit. R. Djokopranoto, *Manajemen Perguruan ...*, 94

<sup>21</sup> R. Eko Indrajit. R. Djokopranoto, *Manajemen Perguruan ...*, 94

<sup>22</sup> Azyumardi Azra, *IAIN di Tengah Paradigma Baru Perguruan Tinggi* dalam "OASIS" Jurnal Pascasarjana STAIN Cirebon Volume 1 No. 2 Juli-Desember 1008, (Cirebon: Program Pascasarjana, 2008), 240.

Dalam dasawarsa terakhir, dunia Perguruan Tinggi Islam Negeri (PTIN) di Indonesia yaitu UIN, IAIN dan STAIN, menggeliat untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi secara lokal maupun global. Wujudnya adalah memperluas kewenangan yang telah dimilikinya selama ini, yang kemudian disebut dengan program “*Wider Mandate*” (Mandat yang diperluas) serta melakukan transformasi atau perubahan dari IAIN/STAIN menjadi Universitas Islam Negeri (UIN).

Perubahan IAIN menjadi UIN dan perubahan STAIN menjadi IAIN/UIN diharapkan mampu memberi peluang bagi rekonstruksi atau reintegrasi bangunan keilmuan, yang menjembatani ilmu-ilmu agama dan umum yang selama ini dipandang secara dikotomis. Dengan demikian lulusan UIN, IAIN dan STAIN mampu bersaing dengan perguruan tinggi umum lainnya baik tingkat lokal maupun global. Selain itu para lulusan PTIN diharapkan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang siap bersaing di dunia internasional.

Membanjirnya ilmu-ilmu dan dosen ke UIN, IAIN dan STAIN sebagai konsekwensi yuridis formal atas pengembangan atau peningkatan status sehingga terbukanya berbagai jurusan-jurusan baru. Pengembangan melalui pembukaan jurusan atau fakultas baru seperti yang terdapat di perguruan tinggi umum bisa memberikan pengaruh juga terhadap jati diri Perguruan Tinggi Islam Negeri, terutama untuk jurusan atau fakultas ilmu agama jika tidak dipersiapkan perencanaan dengan baik dan sempurna.

Dengan lahirnya jurusan-jurusan baru di PTIN dapat memberi kontribusi positif bagi lulusan perguruan tinggi Islam negeri sehingga keahliannya dapat terserap dalam berbagai sektor kehidupan. Masyarakat modern sekarang sangat obyektif dan rasional tidak akan mempan lagi ditawarkan simbol atau sebatas label tanpa makna yang sesuai dengan tuntutan hidup mereka. Akibatnya, jika lembaga perguruan tinggi Islam negeri tidak memberikan sesuatu yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat bisa jadi akan banyak yang meninggalkannya. Sehingga atas dasar pemikiran itu, banyak orang yang mempertanyakan, bagaimana menjadikan pendidikan tinggi Islam semakin maju dan memiliki daya tarik serta siap berkompetesi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Pemerintah melalui Kementerian Agama RI telah mencanangkan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat pendidikan Islam dunia. Islam Indonesia akan

menjadi trade-mark bagi bangsa Indonesia sendiri dan menjadi daya tarik bagi bangsa-bangsa lain untuk belajar tentang Islam. Selain itu, Kementerian Agama juga memberikan program beasiswa 5000 Doktor yang akan menjadi garda terdepan dalam pengembangan kajian Islam di lembaga pendidikan tinggi Islam, Ini merupakan kebijakan pemerintah dalam menyiapkan PTIN sehingga siap berkompetisi menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan dunia global.

Beberapa langkah strategis yang dapat dipertimbangkan dalam pengembangan PTIN menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), yaitu:

1. Perubahan Mindset PTIN dari Paradigma Penonton Menjadi Aktor

Perguruan Tinggi Islam Negeri (PTIN) memiliki peluang yang sangat terbuka untuk turut berperan di pentas internasional, karena PTIN di Indonesia memiliki banyak pemikir, professor yang sudah punya reputasi internasional, ini merupakan potensi dalam mewarnai pemikiran Islam dalam dunia internasional. PTIN jangan lagi mempertahankan mindset menerima bantuan, tetapi sudah harus mengambil inisiatif dan menjadi aktor. Dalam bidang penelitian dan riset berstandar internasional tidak boleh kalah dengan negara-negara tetangga di Asean.

2. Melahirkan Lulusan Memiliki Jiwa Entrepreneurship

Sudah saatnya merubah paradigma lama yang cenderung dogmatis dan birokratis dengan pola pikir *entrepreneurship* yang lebih taktis, efektif dan efisien. Dengan perubahan tersebut, lulusan diharapkan memiliki jiwa entrepreneurial (wirausaha) dan profesional sehingga siap bersaing dalam menghadapi MEA. Dengan memiliki keahlian dan skill yang baik lulusan PTIN tidak menjadi penonton akan tetapi menjadi aktor dalam mewarnai perubahan dikawasan Asean.

3. Diplomasi Jalur Akademik Bertaraf Internasional

Untuk mengoptimalkan citra dan peran PTIN di Asean dan dunia internasional, maka dapat ditempuh melalui jalur akademik. PTIN memiliki para akademisi atau profesor studi keislaman yang memiliki reputasi dan mendapat pengakuan di dunia internasional. Oleh karena itu, perguruan tinggi Islam negeri dapat memperkenalkan studi Islam berciri khas Indonesia kepada masyarakat Asean bahkan dunia. Sudah saatnya kita, bangsa Indonesia punya pandangan sendiri



dalam pengembangan keilmuan di PTIN. Sudah saatnya PTIN tidak lagi bermaklum pada studi-studi keislaman yang dilakukan oleh Eropa dan Amerika. PTIN harus dapat menjadi model pengembangan keilmuan Islam bertaraf dunia. Untuk mewujudkan itu semua, agar para akademisi dari kalangan PTIN dapat berperan aktif dalam mengembangkan disain pengembangan studi-studi keislaman yang bertaraf internasional, khususnya dalam pengembangan kurikulum di PTIN.

#### 4. Pengiriman Dosen PTIN ke Luar Negeri

Program Kementerian Agama meluncurkan program beasiswa 5000 Doktor, dan sebagian beasiswa tersebut pendidikan ke luar negeri, ini merupakan langkah strategis pengembangan PTIN dalam rangka peningkatan mutu dosen berstandar dunia. Dengan fasilitasi dan dukungan dana dari pihak pemerintah diharapkan minat dosen PTIN yang melanjutkan studi ke luar negeri semakin meningkat. Dengan disebarnya dosen PTIN untuk menempuh pendidikan berbagai negara dapat membuka jaringan-jaringan baru untuk bekerjasama lintas perguruan tinggi bahkan lintas negara. Kerjasama penelitian maupun dalam pengembangan pendidikan tinggi Islam di masa yang akan datang.

#### 5. Kebijakan Berbasis Internasional

Program-program berskala internasional tidak dapat berjalan tanpa adanya kebijakan internasionalisasi yang jelas dan fleksibel yang diterapkan di PTIN. Salah satu indikator utama berjalannya internasionalisasi adalah meningkatkan mobilitas kegiatan berskala internasional, baik mobilitas ke dalam (*incoming mobility*) maupun mobilitas ke luar (*outgoing mobility*). Karena itu perlu ada kebijakan pengembangan yang fleksibel dan berwawasan internasional untuk mendorong atau memudahkan terjadinya *incoming mobility* (mobilitas kedalam) dan *outgoing mobility* (mobilitas keluar) dalam lingkungan perguruan tinggi Islam negeri.

#### 6. Peningkatan Kompetensi Bahasa Asing

Kebijakan dan program internasionalisasi tidak mungkin berjalan tanpa bahasa internasional. Berbagai survey internasional mengungkapkan bahwa sebagian besar publikasi ilmiah terbaru dalam bentuk buku dan artikel ditulis dalam bahasa Inggris, sebagian kecil dalam bahasa Arab, dan sangat sedikit dalam

bahasa lainnya. Bahasa Inggris dan bahasa Arab telah menjelma menjadi bahasa internasional dan bahasa ilmu pengetahuan. Dua bahasa asing tersebut hendaknya benar-benar mendapat perhatian serius dari para pimpinan PTIN di Indonesia. Dengan adanya kemampuan bahasa Inggris dan bahasa Arab, diharapkan para dosen dan mahasiswa dapat mengembangkan jaringan komunikasi dan kerjasama akademik ke berbagai negara di dunia. Upaya-upaya pembenahan pengajaran bahasa asing sangat diperlukan, baik pada aspek metode maupun sarana pengajaran, agar pengajaran bahasa asing untuk dosen dan mahasiswa di Perguruan Tinggi Islam Negeri (PTIN) berjalan lebih efektif.

#### 7. Pelayanan Komunikasi dan Administrasi berstandar Internasional

Program-program yang dikembangkan di PTIN diusahakan berkelas dunia. Selain itu, diperlukan pelayanan komunikasi dan administrasi berstandar internasional. Karena itu masing-masing PTIN perlu mengembangkan lembaga pelayanan internasional (*International Office*) yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan berkomunikasi dan memberikan pelayanan administrasi dan akademik sesuai nilai-nilai yang berlaku di dunia internasional. Tanpa *international office* yang kuat, program-program kerjasama berskala internasional di PTIN akan sulit berjalan dan bahkan bisa “layu sebelum berkembang.”

#### 8. Standarisasi Sarana Akademik

Untuk memfasilitasi proses *incoming* dan *outgoing mobility* di kalangan dosen dan mahasiswa, lembaga-lembaga PTAI perlu memiliki sarana akademik berstandar internasional, khususnya sarana yang terkait dengan perpustakaan, perkuliahan, informasi dan komunikasi. Pola pelayanan perpustakaan di lembaga-lembaga PTAI sudah saatnya tidak lagi hanya terkoneksi dengan jaringan *Local Area Network* (LAN), tetapi sudah harus terkoneksi dengan jaringan internet atau berbasis internet (*Internet Based Services*). Untuk mendukung pengembangan pola pelayanan tersebut maka standar atau kapasitas jaringan (*bandwidth*) internet di lembaga-lembaga PTIN perlu ditingkatkan dan disetarakan, agar semua PTIN dapat memfasilitasi berbagai kegiatan akademik berbasis internet, seperti *digital library*, *online library services*, *mobile library*, *interlibrary loan*, dan *interlibrary catalogue system*.

Jaringan internet berkapasitas tinggi juga sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan mutu pelayanan akademik lainnya, seperti program *electronic books (e-books)*, *electronic learning (e-learning)*, *electronic mail (e-mail)*, *electronic journal (e-journals)*, *virtual lecture*, dan *teleconferece*. Program *electronic book* dan *electronic journal* di lingkungan PTIN, misalnya, tidak berjalan efektif, karena tidak didukung oleh standar sarana *Information and Communication Technology (ICT)* dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Dosen dan mahasiswa sulit *mendownload* atau *mengupload* buku-buku dan jurnal yang tersedia secara online, karena terkendala oleh jaringan internet yang memiliki *bandwidth* alakadar dan tidak sempurna.

9. Memperbanyak Kegiatan Penelitian Serta Penambahan Dana Riset

Kegiatan-kegiatan akademik yang dilakukan di PTIN, terutama kegiatan-kegiatan penelitian berskala dunia memerlukan dana dalam jumlah sangat besar. Untuk langkah awal, tentu saja Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dapat menyiapkan dana perangsang (*stimulan*) bagi para dosen PTIN. Tetapi untuk jangka panjang dan untuk menjamin keberlanjutan program-program PTIN bertaraf dunia, maka semua pihak perlu mengupayakan diversifikasi sumber dana (*revenue diversification*), misalnya, dengan mengupayakan dukungan dana dari para donatur, program *Corporate Social Responsibility (CSR)*, pemerintah daerah, dan kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional.

10. Peningkatan Kerjasama Internasional Berbasis Kesamaan dan Kesetaraan

Masyarakat dunia telah mengenal bahwa Indonesia merupakan negara pro demokrasi, memiliki keragaman (*diversity*), dan menerapkan sistem negara kesatuan (*unity*). Tiga potensi tersebut dapat menjadi basis pengembangan kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara lain dalam berbagai bidang, termasuk bidang perguruan tinggi Islam negeri. Peluang kerjasama Indonesia dengan masyarakat internasional semakin terbuka lebar, karena pandangan masyarakat internasional tentang Indonesia semakin positif. Keberhasilan demokratisasi dan toleransi kehidupan beragama di Indonesia, menimbulkan citra positif tentang Indonesia, sehingga banyak tokoh-tokoh internasional yang

menilai Indonesia sebagai “mitra seimbang” untuk kerjasama dalam berbagai sektor termasuk kerjasama dengan pendidikan tinggi Islam.

Beberapa langkah strategis yang telah disebutkan diatas dapat dijadikan pertimbangan bagi pengembangan perguruan tinggi Islam negeri dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. Dengan adanya kesiapan dan perencanaan yang matang, diharapkan PTIN di Indonesia dapat bersaing dengan universitas-universitas yang ada di kawasan Asean.

## **KESIMPULAN**

Perguruan Tinggi Islam Negeri memiliki peranan yang sangat besar dalam mewarnai dan dapat menjadi aktor perubahan di kawasan Asean. Lulusan PTIN diharapkan bisa berkompetesi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Untuk mempersiapkan PTIN ke arah tersebut perlu langkah-langkah strategis dalam pengembangannya. Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan di atas, maka ada beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Perubahan Mindset PTIN dari Paradigm Penonton Menjadi Aktor. Perguruan Tinggi Islam Negeri (PTIN) memiliki peluang yang sangat terbuka untuk turut berperan di pentas Asean dan duni internasional, karena PTIN di Indonesia memiliki banyak pemikir atau profesor yang sudah punya reputasi internasional, ini merupakan potensi dalam mewarnai pemikiran Islam di kawasan Asean dan tingkat dunia. PTIN jangan lagi mempertahankan mindset menerima bantuan, tetapi sudah harus mengambil inisiatif dan menjadi aktor perubahan di kawasan Asean. Diplomasi Jalur Akademik bertaraf Internasional. Ini merupakan langkah mengoptimalkan citra dan peran PTIN di Asean dan dunia internasional, maka dapat ditempuh melalui jalur akademik. PTIN dapat memperkenalkan studi Islam berciri khas Indonesia kepada masyarakat Asean dan dunia internasional. Sudah saatnya PTIN punya pandangan sendiri dalam pengembangan keilmuan dan teknologi. Dan tidak lagi bermakmum pada studi-studi keislaman yang dilakukan oleh Eropa dan Amerika. PTIN harus dapat menjadi model pengembangan keilmuan Islam bertaraf dunia. Untuk mewujudkan itu semua, agar para akademisi dari kalangan PTIN dapat berperan aktif dalam disain

- pengembangan studi-studi keislaman yang bertaraf internasional, khususnya dalam pengembangan kurikulum di PTIN.
2. PTIN harus mampu melahirkan lulusan yang memiliki jiwa *entrepreneurship*. Paradigma lama yang cenderung dogmatis dan birokratis kepada paradig baru untuk melahirkan lulusan berjiwa *entrepreneurship* yang lebih taktis, efektif dan efisien. Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, profesional dan berjiwa entrepreneurial (wirausaha) sehingga siap bersaing dalam menghadapi MEA. Dengan memiliki keahlian dan skill yang tinggi diharapkan lulusan PTIN tidak menjadi penonton akan tetapi menjadi aktor dalam mewarnai perubahan dikawasan Asean.
  3. Pengiriman Dosen PTIN ke luar negeri. Langkah ini sesuai dengan Program Kementerian Agama meluncurkan program beasiswa 5000 Doktor, dan sebagian beasiswa tersebut pendidikan ke luar negari, ini merupakan langkah strategis pengembangan PTIN dalam rangka peningkatan mutu dosen berstandar dunia. Dengan fasilitas dan dukungan dana dari pihak pemerintah diharapkan minat dosen PTIN yang melanjutkan studi ke luar negeri semakin meningkat. Pengiriman dosen PTIN untuk menempuh pendidikan berbagai negara dapat membuka jaringan-jariangan baru untuk bekerjasama lintas perguruan tinggi bahkan lintas negara. Kerjasama penelitian maupun dalam pengembangan pendidikan tinggi Islam di masa yang akan datang.
  4. Kebijakan dan program berbasis internasional tidak mungkin berjalan tanpa peningkatan kompetensi bahasa internasional. Berbagai survey internasional mengungkapkan bahwa sebagian besar publikasi ilmiah terbaru dalam bentuk buku dan artikel ditulis dalam bahasa Inggris, sebagian kecil dalam bahasa Arab, dan sangat sedikit dalam bahasa lainnya. Bahasa Inggris dan bahasa Arab telah menjelma menjadi bahasa internasional dan bahasa ilmu pengetahuan. Dua bahasa asing tersebut hendaknya benar-benar mendapat perhatian serius dari para pimpinan PTIN di Indonesia. Dengan adanya kemampuan bahasa Inggris dan bahasa Arab, diharapkan para dosen dan mahasiswa dapat mengembangkan jaringan komunikasi dan kerjasama akademik ke berbagai negara di dunia. Upaya-upaya pembenahan pengajaran bahasa asing sangat diperlukan, baik pada aspek metode maupun sarana pengajaran, agar pengajaran bahasa asing

untuk dosen dan mahasiswa di Perguruan Tinggi Islam Negeri (PTIN) berjalan lebih efektif.

5. Untuk memfasilitasi proses *incoming* dan *outgoing mobility* di kalangan dosen dan mahasiswa, lembaga-lembaga PTIN perlu memiliki sarana akademik berstandar internasional, khususnya sarana yang terkait dengan perpustakaan, perkuliahan, informasi dan komunikasi. Pola pelayanan perpustakaan sudah saatnya tidak lagi hanya terkoneksi dengan jaringan *Local Area Network* (LAN), tetapi sudah harus terkoneksi dengan jaringan internet atau berbasis internet (*Internet Based Services*). Untuk mendukung pengembangan pola pelayanan tersebut maka standar atau kapasitas jaringan (*bandwidth*) internet di lembaga-lembaga PTIN perlu ditingkatkan dan disetarakan, agar semua PTIN dapat memfasilitasi berbagai kegiatan akademik berbasis internet, seperti *digital library*, *online library services*, *mobile library*, *interlibrary loan*, dan *interlibrary catalogue system*.
6. Kegiatan-kegiatan akademik yang dilakukan di PTIN, terutama kegiatan-kegiatan penelitian berskala dunia memerlukan dana dalam jumlah sangat besar. Untuk langkah awal, tentu saja Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dapat menyiapkan dana perangsang (*stimulan*) bagi para dosen PTIN. Tetapi untuk jangka panjang dan untuk menjamin keberlanjutan program-program PTIN bertaraf dunia, maka semua pihak perlu mengupayakan diversifikasi sumber dana (*revenue diversification*), misalnya, dengan mengupayakan dukungan dana dari para donatur, program *Corporate Social Responsibility* (CSR), pemerintah daerah, dan kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin Abdullah, dkk. *Islamic Studies dalam Paradigma Intergratif-interkoneksi*. Yogyakarta: Suka Press. 2007.
- Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Azyumardi Azra, *IAIN di Tengah Paradigma Baru Perguruan Tinggi dalam "OASIS"* Jurnal Pascasarjana STAIN Cirebon Volume 1 No. 2 Juli-Desember 1008, Cirebon: Program Pascasarjana, 2008.
- Buku Panduan Akademik Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun Akademik 2015/2016, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry
- Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indodesia* Jakarta: Mutiara, 1979.
- Marwan Salahuddin, *Model Pengembangan Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia*, Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, Volume 18 Nomor 1 (Juni) 2014.
- Mansur, Amril dkk. *Paradigma Baru Reformasi Pendidikan Tinggi Islam*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2004.
- Naskah Pidato Menteri Agama dalam Welcoming Speech "*International Conference on Quality Islamic Higher Education*" di Jakarta, 25 Nopember 2014.
- R. Eko Indrajit. R. Djokopranoto. *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*, Yogyakarta: CV. Offset. 2006.
- <http://islamadalahrahma.blogspot.com/2011>. Mustanan, *Lahirnya IAIN Sebagai Perguruan Tinggi Islam*, di akses tanggal 17 Maret 2016.
- [http://id.wikipedia.org/wiki/daftar Perguruan Tinggi Islam Negeri di Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/daftar_Perguruan_Tinggi_Islam_Negeri_di_Indonesia). Di akses Tanggal 17 Maret 2016.
- <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/12/Februari/2015>. G.T. Suroso, *Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan Perekonomian Indonesia*. di akses tanggal 17 Maret 2016.
- <http://pasca.uin-malang.ac.id/> 8 Maret 2016/ Mudjia Rahadjo/*pengembangan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. di akses 21 Maret 2016.
- <http://www.id.stie-stmy.ac.id/berita-165-> 28 Oktober 2014 persiapan Indonesia dalam menghadapi MEA. di akses tanggal 21 Maret 2016.